



Kementerian PPN/  
Bappenas



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia

## Willy Derbyanto

Manajer Bidang Aplikasi dan Teknologi  
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat  
Kementerian PPN/Bappenas

**10 Desember 2024**

Disampaikan pada Forum Satu Data Kota Bogor terkait Penyelarasan Rencana Aksi SDI antara Pusat dan Daerah



# Selayang Pandang SDI



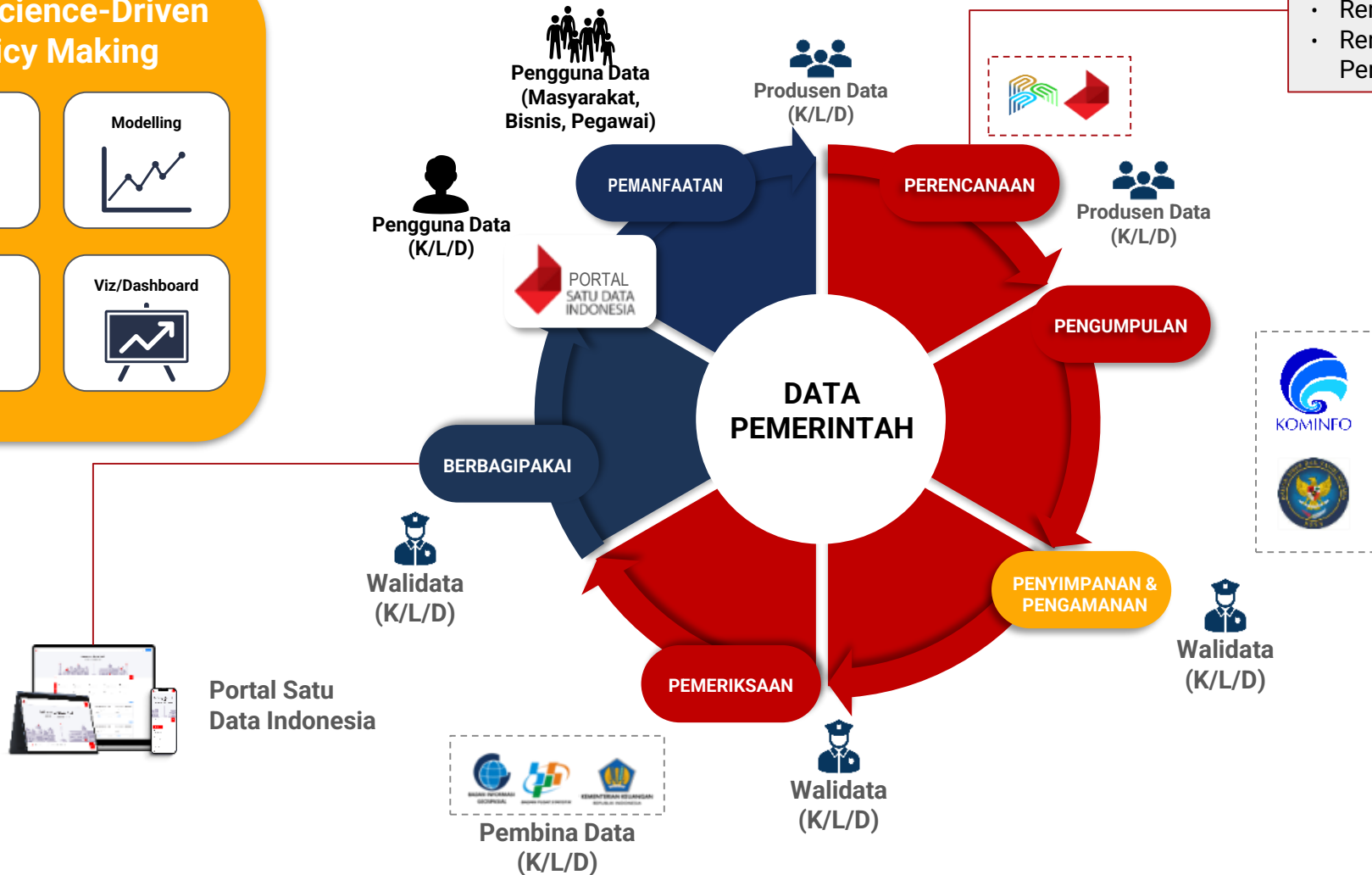
# Tata Kelola Satu Data Indonesia – Perpres 39/2019

## Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah

### Data-Science-Driven Policy Making

- Big Data Analysis
- Modelling
- Artificial Intelligent
- Viz/Dashboard

- Daftar Data
- Data Prioritas
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku



### Prinsip Satu Data

- Standar Data
- Kode Referensi (0101 1101)
- Metadata
- Interop

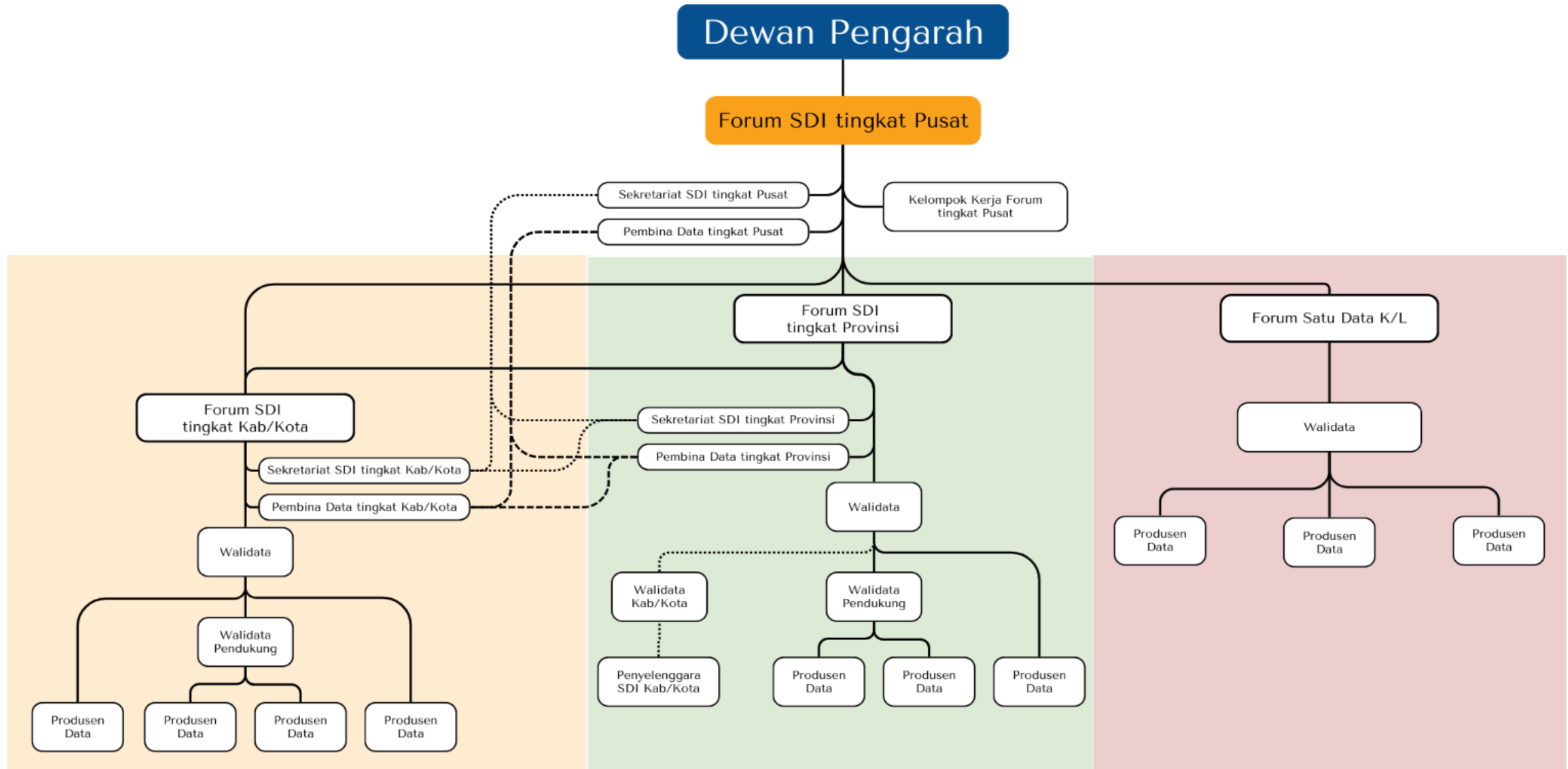


Portal Satu Data Indonesia

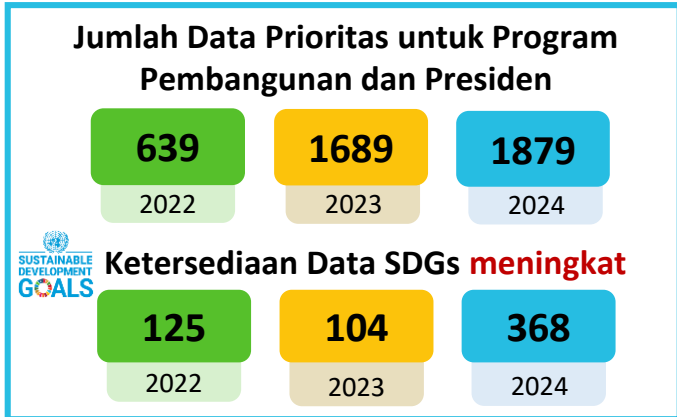


Pembina Data (K/L/D)

# Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia



# Perkembangan dan Highlight SDI 2024



**Belanja SPBE (data/aplikasi/TIK) lebih efisien dan mengurangi duplikasi** melalui Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*).

SDI membentuk **Forum Satu Data** untuk menaungi **Pertukaran Data INADigital (Perpres 82 Tahun 2023)**

- Forum INADigital >> Menatakelola Pertukaran Data, Mengatur Kodereferensi/Data Induk yang digunakan.

**Portal SDI sebagai Open Data Indonesia:**

- Data Terbuka (dapat diakses publik);
- Data Terbatas (memerlukan hak akses).

**Keterisian Data dalam Portal data.go.id**

**285.000+** Dataset

**Keterhubungan Portal Data**

69	31	255
K/L	Provinsi	Kab/Kot

**New Portal SDI**

**Hukum dan Kebijakan Kerangka Satu Data Indonesia yang Tersusun**

3	8	1	8
Peraturan Menteri	Keputusan Menteri	SEB Menteri	Petunjuk Pelaksanaan

**Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan SDI**

44	33	362
K/L	Provinsi	Kab/Kota

**TARGET YANG DITUJU 2024** >>


1. Evaluasi Satu Data Indonesia > Indeks SDI – Bagian RB
2. Platform Open Data Indonesia > Akses Indonesia OECD tahun 2027
3. Satu Kodereferensi Dinamis >> Sinkronisasi Pusat – Daerah
4. New Portal >> Updated and Qualified Data
5. Pemanfaatan Data dalam Pengambilan Kebijakan




# HASIL RAPAT DEWAN PENGARAH SDI (30 Juli 2024)





 **Penguatan Sinkronisasi Pusat-Daerah** melalui Penyusunan **Kodifikasi dan Metadata Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD**

 **Penatakelolaan Platform Pertukaran Data** Tata kelola **pertukaran Data** untuk Mendukung Pelaksanaan Perpres 82/2023 (pemanfaatan **forum SDI**, uji coba INA Digital dengan use case layanan kesehatan)


 **Perluasan Pelaksanaan Clearance** Belanja SPBE di tingkat Daerah untuk efisiensi belanja SPBE di daerah dan harmonisasi kegiatan pusat dan daerah

 **Pengembangan Platform Data Model** guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi aplikasi & pendataan

 **Perluasan Pemanfaatan Data** melalui integrasi Portal Kebijakan Satu Peta dengan Portal SDI dan pemanfaatan Peta Bidang Tanah untuk mendukung pembangunan kewilayahan

 **Percepatan Pemenuhan Prinsip SDI** di tingkat Pusat dan Daerah, antara lain:

1. SDI menjadi bagian penilaian RB
2. Pembangunan database dinamis kode referensi wilayah administrasi
3. Penguatan kompetensi formasi ASN Talenta Digital SDI, serta Pengembangan *Center of Excellence (CoE)* bersama Pemda dan universitas

 **Penguatan Tata Kelola Data** melalui pemutakhiran Permen PPN/ Bappenas No.16 Tahun 2020 tentang **Manajemen Data SPBE**

**“**  
Dengan adanya **Satu Data Indonesia**, diharapkan data yang dihasilkan tidak hanya bermutu dan berkualitas, tetapi juga konsisten, terintegrasi, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, sehingga **mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan transparan.**



**Suharso Monoarfa**  
pada Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia  
30 Juli 2024

**“**  
**Kami (Kementerian Dalam Negeri) akan memperkuat sinkronisasi antara Pusat dan Daerah** dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia melalui kodifikasi dan data-data indikator prioritas.



**John Wempi Wetipo**  
pada Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia  
30 Juli 2024

*data.go.id*

# Masa Depan Satu Data Indonesia



# SDI in the Near Future



Transformasi Tata Kelola  
Pemerintahan

Transformasi Digital

## SDI dalam RPJMN 2025-2029

- 1 Penguatan regulasi SDI
- 2 Membangun Open Data Indonesia (mendukung akses Indonesia untuk OECD)
- 3 Bagian dari Reformasi Birokrasi
- 4 Sinkronisasi Indikator Pusat - Daerah
- 5 Integrator Data



# SDI dalam UU RPJPN 2025-2045



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025—2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Tata Kelola Data Nasional

Terkait dengan transformasi digital pemerintahan, arah kebijakan difokuskan pada (i) transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, serta peningkatan keamanan siber; dan (ii) percepatan kesiapan digital (*digital readiness*) melalui penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat, percepatan pembentukan regulasi yang adaptif, dan pembentukan lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintahan.

## Transformasi Digital dan Ekonomi Digital

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan *super platform*, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi; (ii) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi; (iv) keterpaduan data (*data enablement*); (v) modal investasi teknologi (*financing technologies*); serta (vi) riset dan inovasi. Sinergitas enam prasyarat tersebut perlu diciptakan sebagai tolak ukur terbangunnya ekosistem digital tangguh dan berdaulat pada Tahun 2045.

(vi) Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*) antara lain melalui pengembangan berbagai pusat data nasional baik pemerintah dan swasta, serta penguatan Satu Data Indonesia (SDI);

# Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia



# Sinkronisasi Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia



Kementerian PPN/  
Bappenas



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## Forum SDI tingkat Pusat

Penetapan



Data Prioritas



Rencana Aksi Pusat

\*Tahapan Perencanaan Data



Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk



Penentuan Calon Pembina data lainnya



Pembatasan Akses Data Tertentu



Perselisihan atas Kepemilikan Data

*Penyusunan daftar Data Daerah, Pemerintah Daerah mengacu pada penetapan daftar Data K/L sebagai bagian tidak terpisahkan dari Data prioritas*

*Ketetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*

K/L

Forum Satu Data K/L  
Reguler



Daftar Data K/L



Rencana Aksi K/L

\*Tahapan Perencanaan Data

Acuan

Daerah

Forum Satu Data Indonesia  
tingkat Daerah Reguler



Daftar Data Daerah

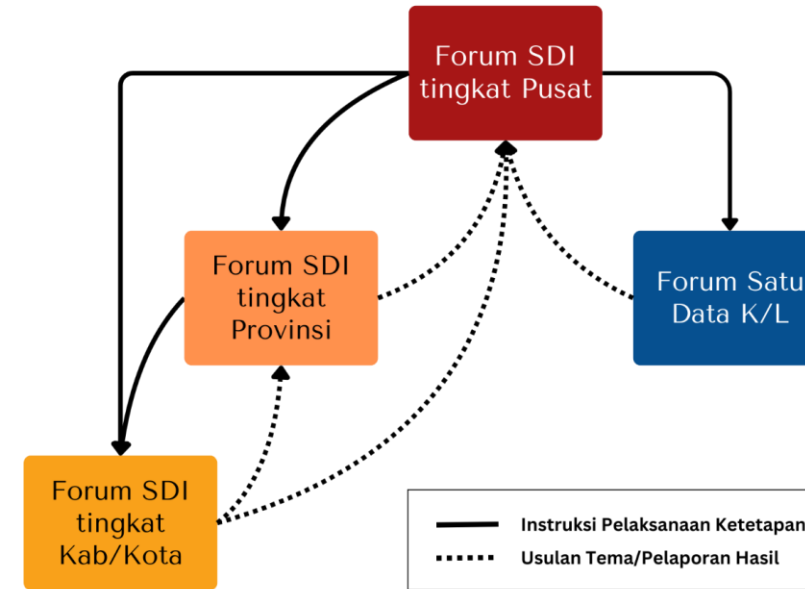


Rencana Aksi Daerah

\*Tahapan Perencanaan Data

# Keterhubungan Forum SDI Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah

- Forum SDI tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) **melaporkan dan berkoordinasi** kepada **Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat**
- Forum SDI tingkat Provinsi **dapat melibatkan** Penyelenggara SDI tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi
- Tema Forum SDI tingkat Daerah Reguler
  - **Penyepakatan Daftar Data Daerah**
  - **Penyepakatan Renaksi Daerah**
- Tema Forum SDI tingkat Daerah Non-Reguler
  - **Penyepakatan perselisihan atas kepemilikan Data**
  - **Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan SDI tingkat Daerah**



*Alur Koordinasi Penyelenggaraan Forum*

**Penyepakatan Penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Penetapan Pembina Data Lainnya dan Perubahan pembatasan akses data mengacu pada penetapan Forum SDI tingkat Pusat**

# Penyelenggaraan SDI Kota Bogor



Kementerian PPN/  
Bappenas



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## Regulasi dan Surat Keputusan Kepala Daerah

- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kota Bogor
- Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 050 /Kep.85-Bappeda/2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Bogor Tahun 2023

## Portal Daerah

- <https://data.kotabogor.go.id/>
- Terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

Wali Kota Bogor  
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung Data yang akurat, mutakhir,



Datasets Kode Referensi Data Insight Publikasi Tentang Regulasi SDI

Login

Dataset

585 Datasets Found for "bogor"

Data Prioritas

Semua Data

Walidata kota\*bogor

Filter by Location

Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terbuka

Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021



OPEN DATA

SATU DATA

SATU PETA

Data akurat tanpa birokrasi rumit

SATU DATA KOTA BOGOR

"Perangkat daerah bisa saling bagi pakai data yang akurat, terstandar tanpa birokrasi untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih terukur."

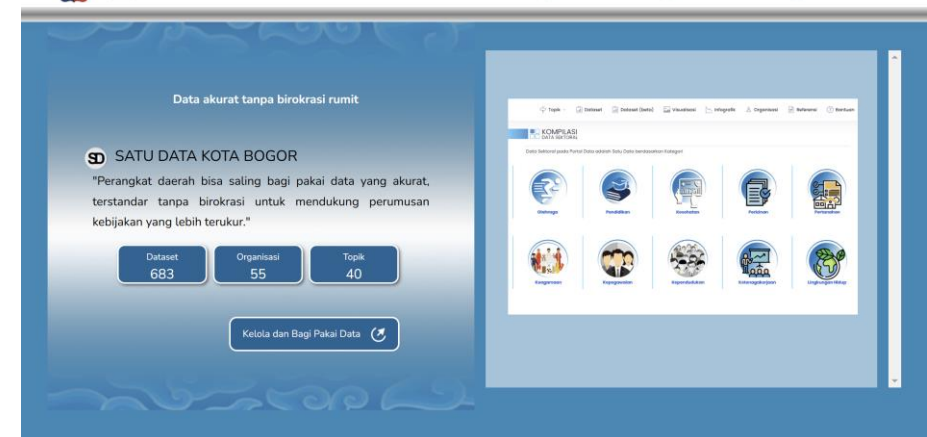
Dataset  
683

Organisasi  
55

Topik  
40

Kelola dan Bagi Pakai Data

Selanjutnya?  
Penyusunan Renaksi



# Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Tinjauan Perpres 39/2019)

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan
- d. kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kota Bogor ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di Tingkat pusat dan daerah. Disamping itu, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang mengacu juga pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 (Kepmen Bappenas Nomor Kep. 115/M.PPN/07/2022) dapat berjalan dengan efisien, efektif, tertib, dan transparan.

# Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Tinjauan Perpres 39/2019)

---

Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten

---

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia

---

Kegiatan-kegiatan terkait pengumpulan data

---

Kegiatan-kegiatan terkait pemeriksaan data

---

Kegiatan-kegiatan terkait penyebarluasan data

---

Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

---

# Evaluasi Strategi Pencapaian SDI 2022-2024

## KEBIJAKAN



- Sinkronisasi cara pandang data dan pengelolaan data antara kerangka kerja SPBE, tata kelola SDI, dan kerangka Transformasi Digital secara umum
- Penguatan dan integrasi kebijakan pada aspek pendanaan, pengendalian, insentif dan disinsentif
- Kebijakan manajemen data selain data indikator pembangunan agar dapat lebih mengena kepada data layanan dan administrasi pemerintah khususnya terkait Data Referensi dan Data Induk

## KOLABORASI



- Peningkatan kolaborasi lintas Instansi (terutama Instansi Dewan Pengarah) dalam proses penyusunan regulasi dan pedoman
- Penguatan koordinasi khususnya pada aspek hubungan vertikal Pusat-Daerah
- Peningkatan kapasitas Provinsi untuk membina dan mengoordinasikan Forum SDI Kabupaten/Kota

## TALENTA



- Kesulitan memetakan dan mengembangkan standar kompetensi, ekosistem manajemen talenta, dan langkah kolaborasi pengembangan talenta
- Ketimpangan pemahaman Instansi tentang kompetensi SDM Data terutama di Daerah

## PROSES



- Harmonisasi ritme penyelenggaraan Satu Data dengan penyelenggaraan pembangunan itu sendiri
- Konsep bagipakai standar data dan metadata perlu diperkuat
- Fokus implementasi/*use case* perlu dipetakan dan dipantau secara lebih intens



- Penyusunan Renaksi SDI di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota **beriringan** dengan penyusunan Renaksi SDI di tingkat Nasional
- Selain Renaksi SDI Nasional, acuan **substansi** Renaksi SDI di tingkat Daerah juga dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan di masing-masing Daerah yang dituangkan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah
- Renaksi SDI di tingkat Daerah diharapkan dapat ditetapkan di **Tahun yang sama** dengan Renaksi SDI di tingkat Nasional
- Forum SDI **Provinsi** diharapkan berperan dalam mendukung koordinasi dan pembinaan Forum SDI dalam rangka pembentukan dan harmonisasi substansi dalam proses penyusunan Renaksi SDI **Kabupaten/Kota** dibawahnya



Kementerian PPN/  
Bappenas



# Terima Kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id

